

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Abad ke-20 menjadi puncak kejayaan wacana negara demokrasi di berbagai belahan dunia khususnya bagi negara-negara yang sedang berkembang. Bentuk pelaksanaan demokrasi di suatu negara akan selalu memengaruhi keberadaan dan jaminan atas HAM di negara tersebut. Suatu negara dapat disebut sebagai negara demokrasi yang baik apabila memiliki kecenderungan untuk menghormati hak-hak dasar warga negaranya.

Bentuk pelaksanaan demokrasi akan selalu memengaruhi keberadaan HAM di suatu negara, sebaliknya keberadaan HAM di suatu negara dapat menjadi ukuran dari pelaksanaan sistem demokrasi di negara yang bersangkutan.<sup>1</sup>

Demokrasi adalah sebuah sistem sosial dan politik yang paling baik saat ini dan menjanjikan solusi terbaik bagi perbaikan tatanan masyarakat di suatu negara. Secara garis besar, demokrasi adalah sebuah sistem sosial-politik modern yang paling baik dari sekian banyak sistem maupun ideologi yang ada dewasa ini. Demokrasi diyakini sebagai landasan hidup bermasyarakat dan bernegara yang meletakkan rakyat sebagai komponen penting dalam proses dan praktik-praktik berdemokrasi.

---

<sup>1</sup> Zerffry Alkatiri, *Belajar Memahami HAM*, (Jakarta: Ruas, 2010), Hal. 62.

Penerapan sistem pemerintahan yang demokratis bukanlah hal yang mudah di setiap negara. Perjuangan untuk demokrasi di Myanmar memiliki sejarah panjang. Myanmar memperoleh kemerdekaannya pada tanggal 4 Januari 1948 setelah terbebas dari kolonisasi Inggris. Seperti yang diketahui oleh semua orang bahwa Burma adalah salah satu negara yang berada dikawasan Asia Tenggara. Namun nama negara Burma tidak lagi terdapat di dalam daftar negara-negara kawasan Asia Tenggara. Terdapat nama lain yang menggantikan nama Burma, yaitu Myanmar. Perubahan nama negara dari Burma menjadi Myanmar dilakukan oleh pemerintahan Junta Militer pada tanggal 18 Juni 1989. Perubahan nama negara menjadi Myanmar ditujukan untuk menghilangkan kesan rasial yang melekat pada nama Burma yang mewakili nama etnis mayoritas di Myanmar.

Perubahan nama dari Birma menjadi Myanmar dilakukan oleh pemerintahan junta militer pada tanggal 18 Juni 1989. Junta militer mengubah nama Birma menjadi Myanmar agar etnis non-Birma merasa menjadi bagian dari negara. Walaupun begitu, perubahan nama ini tidak sepenuhnya diadopsi oleh dunia internasional, terutama di negara-negara persemakmuran Inggris.<sup>2</sup>

Konstitusi Nasional yang dibuat pada tahun 1947 menetapkan sistem pemerintahan parlementer di negara Myanmar. Pada saat itu, Myanmar berada di bawah pemerintahan sipil perdana menteri U Nu. Ia berusaha menjalankan pemerintahan yang demokratis dengan menerapkan sistem parlementer. Sebagaimana halnya negara yang baru merdeka, pemerintahan U Nu juga dihadapkan pada keadaan sosio-politik yang rumit.

---

<sup>2</sup> *id.wikipedia.org/wiki/myanmar*

Strategi pembangunan *Pydawtha* (negara yang makmur), U Nu berusaha keras menyelesaikan berbagai persoalan dalam negerinya.<sup>3</sup> Namun strategi penerapan *Pydawtha* tersebut pada akhirnya mengalami kegagalan. Terjadinya korupsi pada jajaran pemerintah memicu timbulnya perang saudara dan pemberontakan etnis yang memberi dampak pada kemacetan inflasi pada tahun 1950-an.<sup>4</sup> Sehingga pada tahun 1962, terjadi kudeta yang dilakukan terhadap pemerintah oleh Jendral Ne Win dan partainya yaitu *Burma Socialist Program Party* atau Partai Program Sosialis Burma.<sup>5</sup> Militer berhasil menggulingkan kekuasaan perdana menteri U Nu. Pemerintahan Myanmar secara mutlak dikuasai oleh Partai Sosialis sebagai partai tunggal yang mengatur seluruh kebijakan pemerintahan dan menjadikan Myanmar di bawah kekuasaan rezim militer.

Penerapan bentuk pemerintahan militer membuat rakyat merasakan adanya tekanan terhadap semua hak-hak sipil dan politik oleh pemerintah Myanmar. Kegiatan politik dibatasi, larangan mengkritik kebijakan pemerintah, lebih-lebih lagi larangan beroposisi.<sup>6</sup> Peraturan-peraturan tersebut membuat rakyat tidak dapat berperan serta dalam mengawasi kegiatan pemerintahan di Myanmar.

Meningkatnya kecenderungan penggunaan cara-cara dan penerapan kebijakan yang tidak demokratis dalam menjalankan ranah pemerintahan menyebabkan berbagai elemen dari masyarakat sipil Myanmar melancarkan bentuk

---

<sup>3</sup> David I. Steinberg, *Burma: A Socialist of Southeast Asia*, (Colorado: Westview Press, 1982), Hal. 45.

<sup>4</sup> Dirjen Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Indonesia.. *Kerjasama ASEAN Dalam Upaya Menuju Terbentuknya Mekanisme HAM ASEAN*, ( Jakarta: ASEAN Secretariat, 2007), Hal. 2.

<sup>5</sup> Bettina Ling, *Aung San Suu Kyi: Standing Up for Democracy in Burma*, (New York: Feminist Press, 1999), Hal. 14.

<sup>6</sup> Aung San Suu Kyi, *Bebas Dari Ketakuta*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1993), Hal. viii.

ketidakpuasan mereka atas pemerintah yang berkuasa melalui aksi demonstrasi. Pada tanggal 8 Agustus 1988 terjadi gelombang demonstrasi secara besar-besaran yang melibatkan pelajar, pejabat sipil, pekerja hingga para biksu Budha. Para demonstran bergabung sebagai gerakan pro-demokrasi yang menginginkan adanya perbaikan dalam tatanan pemerintahan di Myanmar.

Pecahnya aksi protes mahasiswa di Yangoon sebagai wujud kekecewaan rakyat, dengan cepat gerakan pro-demokrasi berkembang menjadi gerakan nasional. Pemerintah rezim militer menanggapi hal itu dengan keputusan mundurnya Jenderal Ne Win sebagai Ketua Partai Sosialis Myanmar (*Burma Socialist Program Party*) setelah duapuluh enam tahun berkuasa.

Aung San Suu Kyi, anak dari Jenderal Aung San, seorang pahlawan nasional Myanmar secara bersamaan kembali dari Inggris untuk merawat ibunya yang terserang *strok*. Melihat keadaan rakyatnya yang semakin menderita, Aung San Suu Kyi tergerak hatinya untuk segera membantu rakyat Myanmar dalam memecahkan persoalan yang tengah dihadapi dalam negerinya. Dasar perjuangannya dalam menegakkan demokrasi mengacu pada perjuangan yang telah dilakukan oleh Jenderal Aung San semasa hidupnya.

Spirit Aung San Suu Kyi berakar dari pondasi kebudayaan Myanmar yakni agama Buddha tradisional dari Timur. Sedangkan yang menginspirasi spiritualnya ialah Mahatma Gandhi, sang filsuf anti kekerasan India, dan ayahnya sendiri yakni Aung San pemimpin perjuangan kemerdekaan Myanmar

Aung San Suu Kyi aktif dalam melakukan berbagai demonstrasi dan memimpin aksi protes tanpa kekerasan. Pidatonya yang pertama diucapkannya dalam bahasa Myanmar di depan rapat umum di lapangan sebelah barat Pagoda Shwedagon pada tanggal 26 Agustus 1988.<sup>7</sup> Dalam memperjuangkan hak-hak asasi manusia, Suu Kyi terinspirasi dari kajian dan pencerminan falsafah Gandhi, yakni pembangkangan rakyat tanpa kekerasan serta memberikan inspirasi melalui pidato-pidatonya di seluruh negeri.

Aksi protes Suu Kyi juga dilakukan dengan cara mogok makan sebagai upaya penyampaian tuntutan pembebasan tahanan sipil.

Suu Kyi juga memulai aksi mogok makan dalam upaya membebaskan para pendukungnya yang menjadi tahanan politik Junta Militer. Beliau berpuasa selama dua belas hari dan aksi tersebut diakhirinya setelah seorang perwira militer menjamin bahwa para tahanan politik tidak akan dianiaya. Pihak militer juga menawarkan untuk membebaskannya dari tahanan rumah asalkan Suu Kyi bersedia meninggalkan Myanmar. Tapi beliau menolak untuk pergi sampai Negara dikembalikan kepada pemerintahan sipil serta pembebasan terhadap tahanan politik.<sup>8</sup>

Awalnya Suu Kyi hanya mengamati perkembangan konflik politik yang merebak di tanah kelahirannya saja. Namun niat untuk tidak terjun ke dunia politik akhirnya harus kandas dan membawanya bergabung dengan perjuangan untuk kebebasan rakyat Myanmar. Melalui sebuah organisasi politik yaitu *National League for Democracy*, Aung San Suu Kyi terpilih dan dipercaya menduduki jabatan sebagai Sekretaris Jenderal.

---

<sup>7</sup> *Ibid.* Hal. 275.

<sup>8</sup> *Aung San Suu Kyi, tokoh pejuang demokrasi Burma* (Online) <http://www.kaskus.us/showthread.php?t=5983240>

Usahnya dalam menegakkan demokrasi Suu Kyi berusaha menyebarluaskan pemikiran dan tuntutan ke ranah internasional.

Tidak hanya melalui aksi demonstrasi dan partai politiknya, perjuangan Aung San Suu Kyi juga sampai pada pengaduannya melalui Dewan PBB dan wakil-wakil duta besar seluruh dunia untuk memberikan dukungan serta perhatian terhadap pelanggaran HAM yang Terjadi di Myanmar. Pengaduan Suu Kyi tersebut mendapatkan tanggapan positif dengan turunnya resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menekan Junta Militer terutama untuk membebaskan para pemimpin NLD.<sup>9</sup>

Pengaduan Suu Kyi disampaikan melalui surat-surat yang ditujukan kepada para duta besar yang berada di Myanmar. Dalam sejumlah kesempatan, Suu Kyi menyuarakan aspirasinya melalui media massa cetak dan elektronik baik lokal maupun internasional. Beliau juga berjuang melalui tulisan-tuisan sebagai cara dalam membangkitkan semangat juang rakyat Myanmar.

Tindakan yang dilakukan Aung San Suu Kyi membuat pemerintah Junta Militer memberikan berbagai sanksi terhadap Suu Kyi di antaranya adalah ditolaknya perpanjangan visa suami dan anak-anaknya serta penahanan rumah yang dijatuhkan terhadap dirinya tanpa adanya proses hukum yang jelas.

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diketahui bahwa tindakan-tindakan pelanggaran yang dilakukan Junta Militer baik pelanggaran demokrasi maupun HAM menjadi pemicu tindakan rakyat Myanmar untuk melakukan berbagai aksi

---

<sup>9</sup> Ogi Efundani, *Kerjasama Regional ASEAN Dalam Upaya Pembentukan Badan HAM ASEAN (ASEAN Human Right Body) Tahun 2007-2009*, ( Jakarta: UPN “Veteran” Jakarta, 2010).

perlawanan. Hal ini pula yang membangkitkan semangat juang Aung San Suu Kyi dalam upaya menegakkan kembali demokrasi di negaranya,

## **B. Analisis Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor pendorong perjuangan Aung San Suu Kyi di Myanmar.
2. Usaha Aung San Suu Kyi dalam menegakkan demokrasi di Myanmar.
3. Reaksi Junta Militer terhadap perjuangan Aung San Suu Kyi.

### **2. Pembatasan Masalah**

Agar masalah yang dibahas kajiannya tidak terlalu meluas, maka penulis membatasi masalah pada usaha Aung San Suu Kyi dalam menegakkan demokrasi di Myanmar tahun 1988-2000.

Dengan adanya pembatasan masalah tersebut, diharapkan dalam penyusunan penelitian ini dapat sesuai dengan tujuan penelitian.

### **3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Apa sajakah usaha yang dilakukan Aung San Suu Kyi dalam menegakkan demokrasi di Myanmar tahun 1988-2000?”

## **C. Tujuan, Kegunaan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Secara teoritis tujuan penulisan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui usaha-usaha Aung San Suu Kyi dalam menegakkan demokrasi di Myanmar tahun 1988-2000.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Bagi peneliti, para pembaca maupun pihak lainnya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan tambahan pengetahuan dan informasi mengenai usaha Aung San Suu Kyi dalam menegakkan demokrasi di Myanmar.
- b. Sebagai suplemen bahan ajar pada mata pelajaran sejarah di SMA kelas XII semester II pada sub pokok bahasan Pembangunan Mutakhir Dunia.

### **3. Ruang Lingkup Penelitian**

1. Objek Penelitian : Usaha-usaha dalam menegakkan demokrasi
2. Subjek Penelitian : Aung San Suu Kyi
3. Tempat Penelitian : Perpustakaan Universitas Lampung
4. Waktu Penelitian : Tahun 2012
5. Temporal : Tahun 1988-2000
6. Bidang Ilmu : Sejarah